

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok dan Kantor Wali Nagari Persiapan Sungai Nanam Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yaitu:
 - a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nagari persiapan terkait aspek administrasi, kelembagaan, serta pemenuhan persyaratan pemekaran.
 - b. Memberikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama proses persiapan, baik yang berkaitan dengan regulasi, teknis, pelaksanaan, maupun koordinasi antar pihak terkait.
 - c. Mendorong nagari persiapan untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan sehingga dapat menjadi nagari definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memfasilitasi *Focus Group Discussion* (FGD) untuk persiapan pemekaran nagari.
 - e. Melakukan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- f. Melakukan monitoring atau peninjauan langsung ke nagari yang akan dimekarkan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia
 - b. Tidak tersedia anggaran dana dari nagari induk
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
 3. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam persiapan pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, yaitu:
 - a. DPMN memberikan solusi dan Pemerintah nagari harus bekerja rangkap tugas sementara
 - b. DPMN mengupayakan perolehan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan pemerintah Nagari melakukan penggalangan dana secara mandiri
 - c. DPMN membuat regulasi dan pemerintah nagari memanfaatkan swadaya masyarakat sementara.

B. Saran

Penulis mengajukan beberapa saran untuk meningkatkan Peranan Pemerintah Daerah Dalam Persiapan Pemekaran Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok dan Pemerintah Nagari Sungai Nanam, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok perlu meningkatkan aparatur nagari secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

2. Pengalokasian anggaran operasional yang jelas dan berkelanjutan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok disarankan untuk memberikan pengalokasian anggaran operasional yang jelas dan berkelanjutan.

3. Penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari

Pemerintah daerah dan pemerintah nagari harus saling berkoordinasi secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Bimbi Irawan, Rozidateno Putri Hanida, 2020, *Dari Luhak Ke Rantau: Kronik Pemekaran dan Penggabungan Nagari*, Rancak Publik, Padang
- Ernan Rustiadi, 2011, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Hilyatul Asfia, 2023, *Urgensitas Pemekaran Daerah Kalimantan Tengah, Jejak Yogyakarta, Bantul Yogyakarta*
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang
- Ridwan HR, 2001, *Otonomi Daerah*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung
- Samiaji Saroso, 2021, *Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Depok

B. Perundang-Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari, dan Perangkat Nagari

C. Jurnal-Jurnal

Fitria Soamole, Marjam Mangantar, Joy E.Tulung, 2020, 'Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Sebelum dan Sesudah Pemekaran Pulau Tali Abu', *Jurnal EMBA*, Vol.6 No.3

Fitriani, 2021, 'Analisis Kendala Pelaksanaan Pemekaran Daerah', *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.9 No.2

Githa Asmadeningrum Rosady, Jovita Lituhayu Maheswari, Romadona Putri Pertiwi, 2023, 'Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT', *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1 No.2

Monalisa, Andriyus, Rafida Uyun, 2018, 'Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan', *Jurnal Wedana*, Vol.4 No.2

Rondinelti, Hidayat Syarief, 2008, 'Desentralisasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif State', *Society Relation Jurnal Politik*, Vol.1 No.1

Siti Mawar, Nurdin Syah, 2018, 'Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Dari Sistem Hukum Indonesia', *Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.3 No.2

Siti Romdona, Silvia Senja Junista, Ahmad Gunawan, 2025, 'Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, dan Kuesioner', *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol.3 No.1

Undari Sulung, Mohammad Muspawi, 2024, 'Memahami Sumber Data Penelitian Primer, Sekunder, dan Tersier', *EDU Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol.5 No.3

D. Sumber Lainnya

Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013, *Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan*, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang, <https://media.neliti.com>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2024, *Kecamatan Lembah Gumanti Dalam Angka*, <https://solokkab.bps.go.id>

- BPK RI, 2014, UU No.6 Tahun 2014 *Tentang Desa*, <https://peraturan.bpk.go.id>
- BPK RI, 2017, Perda Kab.Solok No 01 Tahun 2017 *Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari*, <https://peraturan.bpk.go.id>
- BPK RI, 2017, PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 2017 *Tentang Penataan Desa*, <https://peraturan.bpk.go.id>
- Dira Putri Lorenza, 2025, *Konflik Hukum Pada Penerapan Sanksi Adat Perkawinan Di Bawah Umur Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Skripsi, UIN Iman Bonjol Padang, , <https://repository.uinib.ac.id>
- M Husnul Mubarak, 2024, *Proses Pembentukan Nagari Lubuk Gadang Barat Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Menjadi Nagari Defenitif Perspektif Siyasah Idariyah*, Skripsi UIN Iman Bonjol, Padang, <https://repository.uinib.ac.id>
- Pikiran Rakyat Garut, *Strategi Pengelolaan Pemekaran Daerah Agar Tidak Menjadi Beban Pemerintah Pusat*, <https://garut.pikiran-rakyat.com>
- Zilyan Hidayati, 2023, *Peran Badan Permusyawaratan Nagari(BPN) Dalam Pemekaran Nagari Persiapan Di Nagari Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok*, Skripsi UIN Iman Bonjol, Padang, <https://repository.uinib.ac.id>